



Marvel Alifio Z A<sup>1</sup> and Dr. Heribertus Jaka Triyana<sup>2</sup>

### ABSTRACT

The BBNJ Treaty or the High Seas Treaty aims to extend the United Nations' jurisdiction to the high seas, for the purpose of conservation and sustainable use of marine biodiversity beyond national jurisdiction. This legal research assesses on how marine conservation in Indonesia will be implemented upon the establishment of the United Nations High Seas Treaty, and the potential challenges that Indonesia shall face upon its ratification.

This legal research adopts the normative legal approach that assesses and reflects on treaties, customary international law, national laws, case laws, and literature studies through primary, secondary, and tertiary legal materials.

The findings implied that Indonesia, in terms of marine conservation, has a parallel pattern and in compliance with the enactment of the BBNJ Treaty or the High Seas Treaty. However, despite of its alignment and compliance, there are possible challenges that Indonesia might face. One of which is the difficulties to implement certain provisions under the BBNJ Treaty or the High Seas. Particularly, the provisions regarding the capacity-building and transfer of marine technologies.

**Keyword:** Biodiversity Beyond National Jurisdiction, High Seas Treaty, Marine Conservation, Jurisdiction

---

<sup>1</sup> Student at the Department of International Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada (IUP 2018).

<sup>2</sup> Lecturer at the Department of International Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.



## **IMPLEMENTASI KONSERVASI PERAIRAN DI INDONESIA: RESPON TERHADAP TERBENTUKNYA HIGH SEAS TREATY OLEH PBB**

Oleh:

Marvel Alifio Z A<sup>1</sup> and Dr. Heribertus Jaka Triyana<sup>2</sup>

### **INTISARI**

*BBNJ Treaty atau High Seas Treaty bertujuan untuk memperluas yurisdiksi PBB hingga ke laut lepas, dengan tujuan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan di luar yurisdiksi nasional. Penelitian hukum ini mengkaji bagaimana konservasi laut di Indonesia akan diterapkan setelah terbentuknya perjanjian ini, dan potensi tantangan yang akan dihadapi Indonesia setelahnya.*

*Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang menerapkan perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, perundang-undangan nasional, pertimbangan kasus atau hukum kasus, dan studi literatur melalui pemanfaatan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.*

*Temuan tersebut mengimplikasikan bahwasanya Indonesia, dalam konteks konservasi laut, memiliki pola dan kecenderungan yang bersifat parallel sesuai dengan pemberlakuan BBNJ Treaty atau High Seas Treaty. Laut tidak hanya berfungsi secara politik, namun juga memiliki peran yang besar untuk perekonomian Indonesia, sehingga sangat berharga. Upaya untuk melindungi keanekaragaman hayati laut telah dilakukan bertahun-tahun. Namun, dengan berlakunya BBNJ Treaty atau High Seas Treaty, tantangan ke depan akan dihadapi oleh Indonesia.*

*Namun, terlepas dari keselarasan dan kepatuhannya, terdapat tantangan yang mungkin dihadapi Indonesia. Salah satunya adalah sulitnya menerapkan atau mengimplementasikan ketentuan tertentu dalam BBNJ Treaty atau High Seas Treaty. Khususnya ketentuan mengenai peningkatan kapasitas dan transfer teknologi kelautan.*

**Kata Kunci:** *Keanekaragaman Hayati di Luar Yurisdiksi Nasional, Perjanjian Laut Lepas, Konservasi Laut, Yurisdiksi*

---

<sup>1</sup> Student at the Department of International Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada (IUP 2018).

<sup>2</sup> Lecturer at the Department of International Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.